

# OPTIMALISASI PELAYANAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

Rosiahatul Khilma

NPP. 29.0851

*Asdaf Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: rosihatulkhilma12@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** This implementation is used for answering the diversity of community needs directly, and its fulfilment becomes the government's responsibility. but in fact there are still many reports which are dominated by the weakness of public services. **Purpose:** This research aims at finding out how to optimize advertising permit in Batang district, Central Java; and finding out supporting and inhibiting factors as well as efforts needed to overcome existing obstacles. **Method:** Research method used is qualitative-descriptive method with inductive approach. Data collection techniques used are interview, observation, and documentation. The theory used and related to this research is the optimization theory by Hotniar Siringoringo which has three dimensions: purpose, alternative solution, limiting resources. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that in the implementation of the advertising permit service carried out by the Investment and One Stop Integrated Service Office of Batang Regency, they still found several obstacles, namely in facilities and infrastructure that were still lacking and needed improvements. The availability of human resources is still lacking, especially in the licensing section and the time for issuing permits that exceeds the existing provisions. **Conclusion:** The results of analysis indicate that advertising permit services of Capital Investment Board and One Stop Service do not run optimally yet, due to some shortcomings in the three dimensions of optimization. For this reason, several efforts have been made to overcome existing obstacles so that in the future services can run optimally. **Keywords:** optimization, services, advertising permit

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan guna menjawab secara langsung keberagaman kebutuhan dari masyarakat yang mana pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak laporan yang didominasi oleh masih lemahnya pelayanan publik. **Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk mengetahui optimalisasi dalam pelayanan izin reklame di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. disamping itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan terkait penelitian ini adalah teori

optimalisasi dari Hotnir Siringoringo yang memiliki tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif solusi dan sumber daya yang membatasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pelayanan izin reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang masih menemukan beberapa kendala yaitu pada sarana dan prasarana yang masih mengalami kekurangan dan perlu adanya perbaikan. Ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang terutama pada bagian perizinan dan adanya waktu penerbitan izin yang melebihi batas ketentuan yang ada. **Kesimpulan:** Pelayanan izin reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal, karena pada ketiga dimensi dari optimalisasi masih terdapat beberapa kekurangan. Untuk itu dilakukan beberapa upaya guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada sehingga kedepannya pelayanan dapat berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** Optimalisasi, Pelayanan, Izin Reklame

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada pada daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, mendorong pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pemerataan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi pokok pemerintahan yaitu pengaturan, pemberdayaan, pelayanan dan pembangunan. Berdasarkan keempat fungsi pokok pemerintahan tersebut salah satunya yaitu pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah tidak diselenggarakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta mewujudkan keadaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Rasyid dalam Labolo 1998). Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan guna menjawab secara langsung keberagaman kebutuhan dari masyarakat yang mana pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 hadir untuk mewakili tuntutan masyarakat dalam mencari layanan publik yang layak, efisien, memiliki kecepatan penyampaian serta keterbukaan dalam penyediaan layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Salah satu bentuk dari pelayanan administratif yaitu pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena melalui perizinan akan terlahir legalitas atas kegiatan yang diajukan. Perizinan juga sebagai alat kontrol pemerintah terhadap kegiatan masyarakat agar tidak ada kegiatan yang saling tumpang tindih.

Pola pelayanan satu pintu menjadi salah satu usaha pemerintah dalam optimalisasi pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, daerah selaku penyelenggara perizinan terpadu satu pintu memiliki kewenangan untuk memilih jenis kelembagaan yang akan diselenggarakan, hal ini disesuaikan kembali dengan kemampuan dan kebutuhan dalam mengelolanya. Jenis kelembagaan tersebut bisa berbentuk dinas, kantor ataupun badan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang merupakan bentuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang memiliki



tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman dan perizinan terpadu. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Perizinan terpadu satu pintu. Harapannya melalui pelayanan terpadu satu pintu akan melahirkan pelayanan perizinan yang memegang prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, aman, ekonomis, adil dan merata. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang menyelenggarakan 63 pelayanan perizinan. Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diselenggarakan yaitu izin reklame. Reklame merupakan media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Sementara Izin reklame adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk dari keputusan diperbolehkannya penyelenggaraan reklame dengan syarat tertentu dan jangka waktu yang ditentukan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan optimalisasi pelayanan izin reklame di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang pertama yaitu adanya jumlah penerbitan izin reklame yang setiap tahun semakin menurun. Pada tahun 2018 jumlah izin reklame yang diterbitkan yaitu sebanyak 77 izin. Pada tahun 2021 menurun menjadi 50 izin dan pada tahun 2020 hanya ada 42 reklame yang terdaftar memiliki izin. Penurunan jumlah izin reklame yang diterbitkan ini berbanding terbalik dengan jumlah reklame yang tidak memiliki izin. pada rentang tahun 2020-2021 di Kabupaten Batang terdapat sekitar 28 reklame yang didirikan tetapi tidak memiliki izin. Angka tersebut tentu bukan lah angka yang sedikit. Banyaknya reklame yang tidak memiliki izin ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin reklame.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 masih ditemukan kendala yaitu terdapat sarana dan prasarana yang masih kurang diantaranya yaitu komputer, laptop, printer, scanner dan personal komputer lainnya. Kurangnya sarana dan prasana ini dapat menyebabkan terhambatnya produktivitas dalam penerbitan izin. Lebih lanjut dijelaskan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 terdapat kendala lain yaitu adanya kompetensi teknis dari pegawai yang masih kurang memadai dan belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan dari pegawai. Selain itu, dalam laporan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021, disebutkan bahwa tidak adanya sumber daya manusia khusus di bagian Sistem Informasi (Programmer) dan masih terjadi kekosongan jabatan pada bidang perizinan sehingga hal tersebut bisa menghambat kinerja instansi dalam pengembangan aplikasi dan sistem lainnya.

Kendala lain juga datang dari masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih belum mengetahui tentang persyaratan dan alur dalam pelayanan perizinan. Bagi masyarakat yang belum lengkap persyaratannya terpaksa harus pulang untuk melengkapi persyaratan dan kembali lagi untuk melanjutkan permohonan atas izin yang diajukan. Hal ini tentu akan memakan waktu, biaya dan tenaga

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian oleh Yantje Yophie Turang (2019) dengan judul Optimalisasi Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bontang. Fokus penelitian ini yaitu

mengetahui tentang bagaimana pelayanan perizinan dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses Perizinan, upaya-upaya inovasi yang dilakukan untuk tercapainya sasaran pelayanan prima bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hasil penelitian yang dilakukan tersebut yaitu implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi sistem penggerak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang berbasis pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat dikategorikan sudah cukup baik namun masih perlu dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara, observasi dan kajian dokumen kepustakaan.

Penelitian kedua yaitu penelitian dari Sukur Suleman dan Ahmad Abd Fatah pada tahun 2021 dengan judul Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis yang dipakai adalah model Milles dan Huberman yakni, pengumpulan data, reduksi data, data display, verifikasi, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota ternate belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari keluhan masyarakat akan minimnya inovasi petugas dalam pelaksanaan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan, prosedur dan kepuasan pelanggan, serta sarana dan prasarana pelayanan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yantje Yophie Turang serta Suleman dan Rahmat Abd Fatah berfokus pada optimalisasi pelayanan secara umum. sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pelayanan izin reklame. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Hotniar Siringoringo (2005) yang menjelaskan bahwa ada tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur optimalisasi yaitu tujuan, alternatif solusi dan sumber daya yang membatasi.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Optimalisasi Pelayanan Izin Reklame di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. s

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki pandangan yaitu fokus sebuah penelitian kualitatif adalah mencari makna (meanings) sehingga perlu disadari bahwa makna (meanings) yang dibangun dalam penelitian kualitatif berawal dari sebuah perumusan masalah yang kemudian disusun menjadi “tema-tema” penelitian yang memiliki sifat subyektif dan jamak (Simangunsong (2017:192). Metode deskriptif kaitanya lebih erat dengan penjelasan berupa kata-kata atau dalam bentuk narasi untuk mengungkapkan sebuah makna dari kenyataan yang ditemukan. Pendekatan induktif yaitu pendekatan dengan teknik penarikan kesimpulan yang berawal dari khusus menuju umum. pendekatan induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.



Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri Sekretaris Daerah, Asisten Bagian Administrasi Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Perizinan, Kepala Seksi Pemrosesan dan Penetapan Perizinan, Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan, Pegawai Bagian Pelayanan Perizinan Reklame, Masyarakat yang mengurus izin reklame (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 5 orang).

Adapun analisisnya menggunakan Model Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017:226) yang terdiri dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verifying* (penarikan kesimpulan).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Optimalisasi Pelayanan Izin Reklame di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendapat dari Hotniar Siringoringo yang menyatakan bahwa proses optimalisasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi yaitu dapat berbentuk maksimasi atau minimasi. Maksimasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu dan sejenisnya. Bentuk maksimasi dari optimalisasi pelayanan sudah tercapai. Pada indikator keuntungan sudah menunjukkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan walaupun tidak signifikan, yaitu dari 42 izin sampai dengan 48 izin. Tujuan hadirnya pelayanan izin reklame yaitu memberikan fasilitas berupa pelayanan yang optimal agar dapat diberikan kepastian hukum, jaminan dan kemudahan bagi masyarakat sehingga akan mewujudkan kepuasan dalam pelayanan yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah izin reklame yang diterbitkan.

Bentuk maksimasi dalam tujuan pelayanan izin reklame selanjutnya yaitu adanya penerimaan yang menguntungkan masyarakat. Pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang sesuai dengan SOP, begitupun dalam pelayanan izin reklame yang harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sudah memberikan kemudahan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.

Kemudahan dalam pelayanan perizinan menjadi hal yang diinginkan bagi masyarakat dan menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan bagi setiap instansi yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kemudahan perizinan mendorong minat masyarakat dalam kepengurusan izin, mengingat saat ini masih ada masyarakat yang enggan mengurus izin dikarenakan pelayanan yang masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapati bahwa pelayanan izin reklame sudah cukup memudahkan masyarakat. Kemudahan dalam pelayanan ini akan memberikan timbal balik yang positif kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui penilaian kepuasan dari masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya, yakni pada tahun 2018 sebanyak 84,11. Pada tahun 2019 sebanyak 86,73 dan tahun 2021 sebanyak 86,75.

Bentuk minimisasi dari optimalisasi pelayanan izin reklame khususnya izin reklame yaitu adanya penurunan materi dan non materi yang tidak mengakibatkan kerugian. Bentuk minimisasi ini berhubungan dengan biaya ataupun waktu. Kepastian biaya dan ketepatan waktu penyelesaian dalam

pelayanan izin reklame menjadi salah satu penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan izin reklame tidak dipungut biaya sepeserpun atau gratis. masyarakat hanya perlu untuk membayar pajak reklame yang dibayarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batang. Selain kesesuaian biaya, ketepatan waktu juga menjadi tujuan dari minimasi pengoptimalan pelayanan izin reklame. Tidak dipungkiri masih terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan izin reklame seperti rekomendasi tim teknis yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan lebih dari 7 hari. Permasalahan lain yaitu ketika pemohon tidak kunjung melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan. Untuk itu perlu adanya komunikasi yang intens antara tim teknis internal DPMPTSP dan tim teknis eksternal DPMPTSP untuk mengkoordinasikan waktu survei lapangan sehingga berita acara dapat segera diterbitkan dan pelayanan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

### **3.2. Alternatif Solusi**

Dalam pengambilan keputusan tentunya akan dihadapkan dari beberapa pilihan untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan. Para pengambil keputusan tentunya menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan suatu keputusan. Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pelayanan izin reklame sudah berjalan dengan cukup baik. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan bahwa dalam pengambilan keputusan pastinya dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengambilan keputusan juga harus didasari oleh regulasi-regulasi yang telah ditetapkan sehingga tidak akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang. Beliau mengatakan bahwa “Kami mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati terhadap kewenangan dalam hal penandatanganan fasilitasi perizinan tentunya menentukan beberapa regulasi-regulasi yang ada. Hal ini yang menjadi dasar perencanaan dalam pengambilan sebuah keputusan. Setelah itu kita susun perencanaan perizinan bersifat tahunan dalam bentuk prosedur atau mekanisme SOP, sehingga apapun yang akan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kami breakdown menjadi sebuah rencana kerja tahunan” Perencanaan menjadi tahap awal yang dilakukan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam proses pengambilan keputusan sebelum akhirnya dilakukan tahap selanjutnya hingga menjadi rencana kerja satu tahun kedepan dan dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan koordinasi guna memilih keputusan terbaik dari berbagai alternatif keputusan yang ada.

Selain itu berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang juga melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pelayanan. Upaya tersebut dilakukan secara internal ataupun eksternal, internal dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas sarana dan prasarana. Sedangkan eksternal dengan bekerjasama dengan pihak luar ataupun pembuatan aplikasi guna mendukung proses pelayanan agar lebih cepat. Upaya ini akan selalu ditingkatkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang setiap harinya semakin meningkat.

### **3.3. Sumber Daya Yang Membatasi**

Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adanya keterbatasan dari sumber daya inilah yang menyebabkan perlu dilakukan proses optimalisasi. Sumber daya tersebut yaitu pegawai, sarana dan prasarana, pembiayaan dan peraturan pemerintah.



Sebagai salah satu sumber daya dalam hal pencapaian tujuan, keahlian pegawai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Pembinaan pegawai dilakukan secara langsung dan berkala. Secara langsung dilakukan dengan cara pimpinan langsung memberikan arahan secara berjenjang. Pembinaan ini berkaitan dengan kemampuan penguasaan regulasi, tugas pokok dan fungsi, sikap dan tata cara dalam memberikan pelayanan. Sementara pembinaan secara berkala dilakukan dengan adanya staff meeting, kase meeting ataupun rapat-rapat insidental lainnya. Akan tetapi dari segi kuantitas, masih terdapat kekurangan pegawai yang menyebabkan pegawai lain mengerjakan tugas ganda. Untuk itu perlu adanya penambahan pegawai agar dapat memberikan pelayanan izin reklame khususnya izin reklame dengan lebih baik dan optimal.

Selain sumber daya manusia atau pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik karena ada standar dari pendirian Mall Pelayanan Publik yang harus terpenuhi. Akan tetapi masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang secara kuantitasnya terutama di bagian front office. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Budi Santoso, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beliau menyampaikan bahwa “Untuk sarana dan prasarana kita sudah baik, komplit, nyaman, semua sudah ada. Karena sudah ada Mall Pelayanan Publik jadi ada standar yang harus dipenuhi untuk sarpras seperti sarana dan prasarana untuk orang difabel. Hanya saja ada beberapa komputer yang perlu diperbaiki dan diganti. Kami rencanakan juga untuk penambahan kursi dan meja di bagian front office atau bagian pelayanan karena masih ada kekurangan”

Pembiayaan dari pelaksanaan pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mencukupi dimana pembiayaan ini berasal dari APBD Kabupaten. Adanya kebijakan refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi covid-19 tidak memberikan dampak besar terhadap kegiatan operasional pelayanan.

Selain pembiayaan, peraturan pemerintah juga menjadi hal penting yaitu sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengacu pada peraturan yang sudah ada, dimana didalamnya sudah mengatur pelaksanaan pelayanan izin reklame. Akan tetapi belum ada regulasi dari pemerintah daerah setempat yang mengatur terkait pelayanan perizinan reklame. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan wawancara dengan Asisten Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Beliau menuturkan bahwa “Untuk peraturan daerah terkait pelayanan izin reklame saat ini belum ada, kami hanya mengacu pada peraturan yang sudah ada sebelumnya”

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian terkait Optimalisasi Pelayanan Izin Reklame di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori Optimalisasi dari Hotniar Siringiringo (2015) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Optimalisasi berdasarkan indikator tujuan, alternatif solusi dan tujuan yang membatasi dalam pelaksanaannya masih menadapat kendala dan juga permasalahan sehingga belum optimal dalam indikator tertentu. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Winardi:1999). Pelaksanaan optimalisasi merupakan proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana

guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Begitu juga dalam proses optimalisasi dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. sesuai dengan temuan Sukur Suleman dan Rahmat Abd Fath yang menjelaskan kepuasan pelanggan menjadi prioritas dalam segala aspek pelayanan, baik berupa pelayanan Izin administratif, jasa bahkan barang publik lainnya, masyarakat menginginkan ada standar prosuderal yang tepat dan itu kemudian tersampaikan dengan jelas dan terbuka, profesionalitas petugas layanan harus dikedepankan.

Dalam pelaksanaannya proses optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang juga masih mengalami kendala yaitu ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang dari segi kuantitas. Layaknya penelitian yang dilakukan oleh Yantje Yophie Turang diantaranya kelemahan dalam hal kemampuan SDM beradaptasi dengan sistem serta kurang memenuhi standar, sarana dan prasarana masih belum lengkap. Selain itu terdapat kendala lain yaitu pada keterlambatan surat izin yang diterbitkan. Hal ini juga yang terjadi pada penelitian Yantje Yophie Turang yaitu waktu pengurusan perizinan yang masih belum sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

#### **IV. KESIMPULAN (5-10%)**

Pelayanan izin reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal, karena pada ketiga dimensi dari optimalisasi masih terdapat beberapa kekurangan. Tujuan dari optimalisasi pelayanan izin reklame yaitu minimisasi waktu belum tercapai, masih ditemukan waktu penyelesaian pelayanan izin reklame yang melebihi batas waktu yang ditetapkan pada SOP. Selain itu, sebagai sumber daya yang membatasi, masih terdapat kekurangan secara kuantitas untuk jumlah pegawai dan sarana dan prasarana yang ada. guna meminimalisir hambatan yang ada dilakukan upaya baik secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Upaya langsung yang dilakukans berupa penambahan sarana dan prasarana, penambahan pegawai dan meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis lainnya. edangkan upaya tidak langsung yang dilakukan berupa dilakukanya sosialisasi baik dengan bekerjasama dengan BPKAD ataupun melalui media sosial dan penerapan peraturan daerah terkait pelayanan izin reklame.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pelayanan izin reklame di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembanganya (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Moengin, P. 2011. *Metode Optimasi*. Bandung: Muara Indah



- Rasyid, Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarif Watampone.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siringoringo, H. 2005. *Pemograman Linier: Riset Operasi*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fatah, Rahmat Abd dan Suleman, Sukur. 2021. *Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate*. Vol 7, Maluku: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
- Turang, Yantje Yophie. 2019. *Optimalisasi Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bontang*. Jurnal Manajemen Vol 16 Bontang: Universitas Trunajaya Bontang

